

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERIODE 2008 - 2012**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada  
Universitas Bengkulu  
Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Sarjana Ekonomi

**Oleh:**

**KEVIN RADITYA FAUZI**  
C1B010024

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN MANAJEMEN  
2014**

Skripsi oleh **Kevin Raditya Fauzi** ini

Telah diperiksa oleh pembimbing dan disetujui untuk diuji pada Ujian

Skripsi/*Comprehensif*

Bengkulu, Februari 2014

**Pembimbing**



**Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.sc., Ak**

**19600915 198903 1 004**

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Manajemen**



**Dr. Drs. Syaiful Anwar AB., Su**

**19571010 198403 1 004**



Skripsi oleh **Kevin Raditya Fauzi**

Telah diperiksa oleh pembimbing dan dipertahankan di depan Tim Penguji pada

Rabu, 19 Februari 2014

Bengkulu, 19 Februari 2014

Pembimbing

Penguji Utama



**Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.sc., Ak**

NIP. 19600915 198903 1 004



**Paulus S Kananlua, S.E., M.Si**

NIP. 19580510 198903 1 002

Anggota I

Anggota II



**Drs. Sri Warsono, M.Si**

NIP. 19540512 198601 1 001



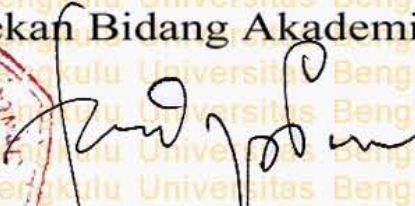
**Nasution, S.E., M.D.M**

NIP. 19620707 1991001 1 003

Mengertahui:

An. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. Fahrudin JS. Pareke, S.E., M.Si**

NIP. 19710914 199903 1 004

## MOTTO

- ❖ **Tuhan takkan berikan cobaan melebihi kemampuanmu.  
Ketika putus asa, ingatlah, jika Tuhan memberinya  
padamu, Dia aka membantu melewatinya.**
- ❖ **Terkadang kepedihan harus dilalui sebelum tercapainya  
kebahagiaan. Tersenyumlah ketika bersedih, karena akan  
ada kebahagiaan setelah itu.**
- ❖ **God Always has something for you, a key for every  
probelm, a light for every shadow, a relief for every sorrow  
& a plan a every tommorow**
- ❖ **You can do anything if you try.**
- ❖ **If you choose a good path then get good results.**
- ❖ **Every moment is like gold, you'll remember when you're old**

## Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang – orang tersayang:

- Allah SWT. Alhamdulillah Yaa Allah, Terima kasih atas kemudahan yang engkau berikan atas penyelesaian skripsi ini. Terima kasih masih telah memberikanku kesehatan seperti dulu kala. Semoga aku dapat menjadi orang yang lebih baik lagi nikmat-Mu.
- Anugrah yang terpenting dalam hidupku. Kedua orang tuaku, ayahanda Drs. Fauzi dan Ibunda Diah Winarsih S.H. Terima kasih atas semua doa, dukunagan moril maupun materil yang takkan ternilai harganya. Terima kasih Ayah Ibu atas pengorbanan, serta jerih payah, didikan hingga dapat menjadikan Kevin seperti saat ini. Semoga Kevin juga dapat menjadi seseorang yang kuat dan sabar seperti Ayah dan Ibu dalam mengarungi kehidupan saat ini dan seterusnya. Semoga Kevin bisa membahagiakan Ayah Ibu. Amin...
- Saudaraku mbak Indah Permata Dewi S.ikom dan saudara kembarku Harrys Raditya Fauzi. Terima kasih atas bantuan dan semua dukungan yang telah diberikan. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil serta bisa membahagiakan Ayah Ibu. Amin...
- Untuk My Twin Harrys Raditya Fauzi seorang pendamping hidup dari semenjak dikandung hingga sampai saat ini semoga cepat menyusul mendapatkan gelar sarjana SH nya. Amin....
- Untuk seorang yang telah lama menemani setiap langkahku selama sembilan tahun ini, Veni Mayasari S.ked. Terima kasih telah menjadi kekasih terhebat, penyemangat, sekaligus tempat suka dan duka ku selama ini. Semoga aku bisa menjadi yang lebih baik lagi. Semoga Vee dilancarkan di masa koas nya dan menjadi dokter yang bisa membantu setiap orang yang membutuhkan. Amin... Love you <3 Vee
- Untuk Eyang ku terima kasih atas nasehat dan omelannya yang akan selalu menjadi semangatku untuk bangun sepagi mungkin.

- Untuk Bunda Elly dan Pakde Triyogo Hamzah terima kasih atas kiriman makanan setiap harinya selama aku menempuh pendidikan di Bengkulu.
- Untuk semua sepupu ku, Almh.mbak Rieza, mbak Tila, mbak Keke terima kasih atas bantuan dan semangatnya selama ini.
- Untuk semua keluarga besar Murman Affandi dan Hamzah Syamsudin saya ucapkan terima kasih atas pengalaman serta sejarah yang datuk dan eyang perbuat untuk Bengkulu dan dapat menjadi contoh bagi kami semua. Semoga Kevin bisa menjadi salah satu penerus perjuangan Keluarga kita.
- Untuk semua teman seperjuangan baik dari masa SD, SMP, dan SMA untuk Devra, martha, Aviz, Alviq, Adi S, Adi G,Tari, Nadya, Ayu, Tia semoga kalian semua dapat menyelesaikan kuliah kalian dengan lancar dan dapat berkumpul kembali hingga kita tua nanti.
- Lia SE, F.syah, dan Billy terima kasih yang sebesar – besarnya saya ucapkan atas semua bantuannya selama ini sampai saya menyelesaikan skripsi ini.
- Dan juga semua sahabat – sahabat yang ada di Manajemen A 2010. Yogie, Ian, Rio, Meily SE, Vivi SE, Ami SE, Rian, Sandi, Hermanto, Davie, Robby, Wulan, Feny, dhanti, Hanur, Puspita dan Liza. Terima kasih atas semua kebersamaan dan perjuangan kita bersama – sama selama ini. Masuk serempak, keluar serempak!!!!
- Kakak senior yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, Abang Eka SE, dan Donga Arief SE.
- Teman – teman seperjuangan Manajemen Ekstensi Dytha dan Febrian.
- Serta untuk adek tingkat angkatan 2011 Lovinry, Husni, Vina, meiza, fenny, dity, nadya serta adek – adek yang lain semoga cepat nyusul tahun depan.
- Untuk Mbak Yayuk, Mbak Risma, Mbak Mira serta ibuk El terima kasih atas bantuannya selama ini.
- Teman – teman KKN Pasar Pedati 3, Buk kordes Florini, Yuyun, Febrian, Andy, Uchi, Lenny dan Wisnu.
- Untuk Almamaterku.



## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

### **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERIODE 2008 – 2012**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dan meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan, pendapat, ataupun pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah – olah sebagai tulisan saya sendiri dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya ambil, meniru atau menyalin dari orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas baik sengaja maupun tidak sengaja, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan saya sendiri. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalahi atau meniru tulisan orang lain seolah – olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan Universitas batal saya terima.

Bengkulu,      Februari 2014

Penulis

# **PERFORMANCE ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERIOD SOUTH BENGKULU 2008 – 2012**

Kevin Raditya Fauzi <sup>1)</sup>  
Ridwan Nurazi <sup>2)</sup>

## **ABSTRACT**

The purpose of this study is to analyze the financial performance in the district South Bengkulu using independence ratio, the ratio of effectiveness, efficiency ratio, and the ratio of the growth period of 2008 to 2012.

The data used in this study was a secondary data obtained from the local government district of South Bengkulu in this case DPPKAD (Department of Revenue , Management , and Asset Finance Regions).The data used were in the form of the figures contained in the Report of the Local Government Budget Realization South Bengkulu fiscal year 2008-2012 and other data related to the research.

The results show that the level of independence of South Bengkulu regency administration is still quite dependent on grants from central and provincial governments. For effectiveness and efficiency in managing PAD South Bengkulu can be quite good. As for the ratio of revenue growth , indicating that growth has not been consistent.

**Keywords:** Independence Ratio, The Ratio of Effectiveness, Efficiency Ratio, The Ratio of The Growth, Financial Performance

<sup>1)</sup>Students of Economics and Business Faculty University of Bengkulu

<sup>2)</sup>Supervisor



# **ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PERIODE 2008 – 2012**

Oleh :

Kevin Raditya Fauzi <sup>1)</sup>  
Ridwan Nurazi <sup>2)</sup>

## **RINGKASAN**

Pada saat ini maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, selaku Pemerintahan Daerah yang melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dituntut untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan kemandirian sangat erat hubungannya dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dari ketergantungan kepada pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan. Menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan periode tahun 2008 – 2012.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dari kinerja keuangan daerah, mengenai realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bengkulu Selatan dilihat dari tingkat kemandirian, efektifitas, efisiensi dan pertumbuhan setiap tahunnya selama periode 2008 – 2012.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung di instansi pemerintahan, dalam hal ini Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD). Dengan mempelajari dokumen dan arsip - arsip dari dinas tersebut ataupun data - data yang berkaitan dengan penelitian. Dan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian (field research) pada instansi Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengelola keuangan daerah mengenai tingkat kemandirian daerah adalah rendah sekali. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya, karena masih sangat rendah sekali dalam kemandirian disebabkan rendahnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dibanding dengan transfer dari pemerintah Pusat dan Provinsi. Ini dilihat dari jumlah PAD yang diterima masih di bawah 5% dari total dana perimbangan, jauh dari standarisasi yang dapat dikatakan baik dari Pola Tingkat Kemandirian dan

Kemampuan Keuangan Daerah. Untuk efektivitas dan efisiensi dalam mengelola PAD Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dikatakan sangat efektif serta efisien karena dapat mencapai target yang dicapai bahkan over target dan menetapkan upah pungut sesuai dengan aturan yang ada yaitu maksimal 5% untuk kabupaten/kota. Sedangkan untuk rasio pertumbuhan PAD, menunjukkan pertumbuhan yang belum stabil.

Kata kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, dan Kinerja Keuangan

<sup>1)</sup> Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

<sup>2)</sup> Dosen Pembimbing Skripsi

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Maha Suci Allah. Sholawat dan salam kepadamu Nabi akhir zaman yaitu Muhammad SAW. Rasa syukur selalu dihaturkan untuk-Mu Yaa Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Mu jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2008 – 2012”.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami begitu banyak pengalaman yang berarti, mulai dari pengumpulan data, penyusunan, bimbingan serta penyelesaiannya. Alhamdulillah berkat bantuan, bimbingan serta doa dari berbagai pihak saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Reguler Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.sc., Ak. Selaku pembimbing skripsi dan Rektor Universitas Bengkulu yang selalu meluangkan waktu ditengah – tengah kesibukannya memberikan arahan, petunjuk, dan kesabarannya kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan.
2. Bapak Paulus S Kananlua, S.E., M.si. Sebagai ketua penguji skripsi.
3. Bapak Drs. Sri Warsono., M.si. sebagai anggota tim penguji.
4. Bapak Nasution, S.E., M.D.M. sebagai anggota tim penguji.

5. Bapak Prof. Lizar Alfansi, S.E., M.sc., ph.D selaku dosen pembimbing akademik yang juga sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu.
6. Bapak Dr. Drs. Syaiful Anwar, A.B., S.U selaku ketua jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu.
7. Bapak dan Ibu dosern serta staf karyawan – karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu.
8. Bapak Ardiansyah S.E., M.si. selaku Kabid Bendaharaan di DPPKAD Bengkulu selatan.
9. Ibu Oci S.E selaku Kabid Pendapatan di DPPKAD Bengkulu Selatan.

. Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang dimiliki, karena itu penulis memohon maaf jika pada penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kelemahan. Dan harapan penulis semoga skripsi ini mendatangkan manfaat bagi kita semua, Amin.

Bengkulu, Februari 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Definisi Laporan Keuangan .....	9
2.2 Tujuan Laporan Keuangan .....	10
2.3 Komponen-Komponen Laporan Keuangan .....	12
2.4 Definisi Kinerja .....	13
2.5 Indikator Kinerja .....	15
2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
2.7 Analisis Rasio Keuangan .....	18
2.8 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan .....	19
2.9 Jenis – Jenis Rasio keuangan .....	20
2.10 Penelitian Teradahu .....	23
2.11 Kerangka Pikir .....	25
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Variabel Penelitian .....	27
3.3 Asumsi Penelitian .....	31
3.4 Lokasi Penelitian.....	32
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	32
3.6 Jenis dan Sumber data.....	32
3.7 Metode Analisis.....	35

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Selatan .....	39
4.2 Laporan Realisasi Anggaran .....	39
4.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	41
4.3.1 Pajak Hotel .....	41
4.3.2 Pajak Rumah Makan .....	41
4.3.3 Pajak Reklame .....	42
4.3.4 Pajak Penerangan Jalan .....	42
4.3.5 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C .....	42
4.3.6 Pajak Parkir .....	42
4.3.7 Pajak Air Tanah .....	43
4.4 Analisis Data .....	44
4.5 Pembahasan .....	54
4.5.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	54
4.5.2 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) ....	56
4.5.3 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	58
4.5.4 Rasio Pertumbuhan .....	59

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	62
5.2 Saran .....	64

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah.....	20
2.2 Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah.....	21
2.3 Efisiensi Keuangan Daerah.....	22
2.4 Penelitian Terdahulu .....	23
3.1 Operasionalisasi Variabel .....	30
3.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2008 ,2009,dan 2010.....	33
3.3 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2011 Dan 2012.....	34
3.4 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah.....	36
3.5 Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah.....	37
3.6 Efisiensi Keuangan Daerah.....	37
4.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2008 ,2009,dan 2010.....	40
4.2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2011 dan 2012.....	41
4.3 Pendapatan Asli Daerah Periode Tahun 2008 – 2012.....	43
4.4 Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2008-2012 .....	45
4.5 Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah.....	46
4.6 Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2008-2012 .....	48
4.7 Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah.....	49
4.8 Perhitungan Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2008-2012 .....	51
4.9 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah .....	52
4.10 Perhitungan Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2008-2012.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir .....	26
4.1 Grafik Pendapatan Asli Daerah Bengkulu Selatan Tahun 2008 – 2012 .....	44
4.2 Grafik Rasio Kemandirian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2008-2012 .....	46
4.3 Perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2008-2012 .....	49
4.4 Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2008-2012 .....	51



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan.....	70
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan.....	71
3. Hasil Perhitungan Rasio dan pembuatan Grafik .....	82
4. Ringkasan Perubahan APBD 2008 .....	86
5. Ringkasan Perubahan APBD 2009 .....	86
6. Ringkasan Perubahan APBD 2010 .....	87
7. Ringkasan Perubahan APBD 2011 .....	89
8. Ringkasan Perubahan APBD 2012 .....	91
9. Surat Izin Penelitian Universitas Bengkulu .....	92
10. Surat Rekomendasi Penelitian di Kabupaten Bengkulu Selatan .	93
11. Surat Izin Penelitian di DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan	94

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamatkan diselenggarakannya otonomi seluas – luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu ada pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah , dan antar pemerintah daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber – sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi Daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang tersebut telah memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemda tingkat kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi, sehingga mendorong Pemda untuk lebih

memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Sebenarnya pertimbangan mendasar terselenggaranya otoda adalah perkembangan dari dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (*desentralisasi*). Selain itu, keadaan luar negeri yang banyak menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk setiap Pemda. Hal tersebut akan tercapai dengan peningkatan kemandirian Pemda melalui program otoda. Tujuan program otoda adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Ciri yang menunjukkan daerah otonomi mampu berotonomi adalah sebagai berikut (Halim, 2002):

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar.

Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan serta menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah, yaitu dengan menganalisa laporan yang telah dibuat pemerintah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban

pemerintah daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintahan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran memiliki peran penting dalam stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja.

Pengelolaan potensi daerah tersebut harus selalu dalam koridor semangat mewujudkan *good governance*, yakni suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan negara yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif dengan menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha secara luas. Upaya perwujudan *good governance* itulah sehingga muncul pula paket undang-undang keuangan negara guna mengatur pengelolaan keuangan negara baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang terdiri UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Implementasi lebih lanjut maka terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut tentunya mewajibkan setiap pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku (Hadi 2010: 29).



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemda. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Tujuan pelaporan keuangan oleh Pemda adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) Pemda atas sumber yang dipercayakan. Pemda sebagai pihak yang disertai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dituntut kemandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah

dan pembangunan. Anggaran belanja rutin maupun pembangunan tidak lagi berasal dari pusat, tetapi lebih banyak berasal dari sumber-sumber daerah sendiri. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah di satu sisi disambut baik oleh sebagian pemerintah daerah (kabupaten dan kota), namun disisi lain justru direspon sebaliknya dikarenakan belum siapnya daerah memasuki era ini karena rendahnya kapasitas fiskal daerah (Adi, 2012).

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah. Tiga sumber tersebut langsung dikelola oleh pemerintah daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan pemerintah pusat (Halim, 2008).

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seharusnya mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Kuncoro, 2008).

Pemerintah pusat terkadang juga ikut campur tangan melalui pemberian transfer atau bantuan (dana perimbangan) bagi daerah. Hal ini pula yang menjadi penyebab munculnya permasalahan di daerah, seperti masih adanya arogansi pemerintah pusat yang hingga kini belum menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada daerah. Sikap pemerintah pusat yang demikian ini sangat menyulitkan departemen keuangan untuk menghitung secara pasti berapa penghasilan yang didapati dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Selain itu, pemerintah pusat memandang bahwa PAD ke depan sangat strategis didalam menyukkseskan proses *desentralisasi*, persoalannya adalah bagaimana pemerintah daerah mengembangkan dan mengefektifkan PAD tanpa harus membebani investor atau masyarakat lokal. Menurut Saragih (2003), bahwa dikhawatirkan otonomi daerah mengalami penyempitan makna menjadi kebebasan untuk memungut pajak dan retribusi oleh daerah, terutama pada daerah-daerah yang minim sumberdaya alam sehingga hanya sedikit mendapatkan dana bagi hasil (*profit sharing*). Otonomi daerah selama ini dalam kenyataanya tidak berhasil mengembangkan potensi daerahnya, padahal tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian di suatu daerah dalam mengoptimalkan sumber – sumber PAD di daerahnya masing – masing, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Selaku Pemerintahan daerah yang melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dituntut untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan meningkatkan kemandirian daerah. Peningkatan

kemandirian sangat erat hubungannya dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dari ketergantungan kepada pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kabupaten ini menjadi menarik sebagai salah satu obyek penelitian karena adanya sebuah sumber dari Rakyat Bengkulu pada hari senin tanggal 13 Mei 2013 yang memberitakan bahwa “PAD 2012 Over Target”. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membuktikan kemampuan Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengelola keuangan daerahnya dan melihat dari kemandirian, efektifitas, efisiensi serta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengangkat judul, **“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2008-2012”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana tingkat efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan?
3. Bagaimana tingkat efisiensi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan?

4. Bagaimana tingkat Pertumbuhan keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Rasio Efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Instansi pemerintahan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Ilmu pengetahuan

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai kinerja keuangan daerah.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Laporan Keuangan**

Kieso *et al* (2002:3) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini melampirkan sejarah perusahaan yang dikuantitatifkan dalam nilai moneter.

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Biasanya laporan keuangan dapat dijadikan acuan mengukur kinerja keuangan suatu entitas dengan menggunakan analisis rasio dari angka-angka pada pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Dalam mengukur kinerja keuangan dengan analisis rasio atas laporan keuangan pemerintah tentunya berbeda dengan analisa keuangan pada sektor bisnis. Hal tersebut sudah tentu karena dalam kinerja pemerintah tidak terdapat “net profit” (istilahnya laba bersih). Analisis rasio yang berlaku bagi keuangan daerah akan sangat berbeda dengan analisis rasio pada perusahaan (bisnis) karena ciri yang melekat kuat pada Pemda yaitu tidak digunakan untuk menghitung laba yang akan diperoleh (Prasetya, 2005: 47).

Halim (2008) Laporan keuangan merupakan laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status

keuangan dari individu, sosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan kuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan pencatatan transaksi dan pengikhtisaran dan pelaporan yang dapat memberikan informasi bagi pemakai. Seperti yang kita tahu bahwa informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk mengambil keputusan. Informasi yang tepat akan sangat berguna dalam mengambil berbagai keputusan.

Halim (2008) mengartikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang itu belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan undangundang yang berlaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut

## **2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk



pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait (Hadi, 2010: 30)

Mardiasmo (2002: 162) laporan keuangan memiliki tujuan umum bagi organisasi pemerintahan dalam mengambil suatu keputusan untuk mengambil tindakan apa yang harus dilakukan seterusnya, tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### **2.3 Komponen-Komponen Laporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis.

#### **2.4 Definisi Kinerja**

Halim (2008) kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu di raih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi yang

dianggarkan oleh pemerintah daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (output) maksimal dengan menggunakan biaya (input) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan Julitawati (2012: 6)

Kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah digunakan analisis rasio keuangan sedangkan laporan kinerja keuangan merupakan salah satu laporan keuangan entitas akuntansi pemerintahan yang dihasilkan menggunakan basis akrual. Laporan kinerja keuangan merupakan laporan keuangan yang menggambarkan kegiatan operasional suatu entitas selama periode tertentu. Dalam laporan ini akan terlihat pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitas serta biaya dalam rangka perolehan pendapatan tersebut. Laporan ini dapat juga dipersamakan dengan laporan pendapatan dan belanja (*statement of revenues and expenses*), laporan laba rugi (*statement profit and loss*), atau laporan operasional (*operating statement*). Dalam penyajian terhadap laporan realisasi anggaran, pendapatan diklasifikasikan sesuai dengan kegiatan operasional entitas. Apa bila entitas memperoleh pendapatan yang berasal dari pungutan pajak, maka pendapatan tersebut dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Namun apabila entitas memperoleh pendapatan dari penjualan barang dan jasa, maka entitas tersebut dapat diklasifikasikan pendapatan tersebut sesuai dengan jenis penjualan barang dan jasa. (Nordiawan, 2008: 159)

## **2.5 Indikator Kinerja**

Mardiasmo (2002: 220) Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal (pemerintah daerah) dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya. Dengan kata lain, indikator kinerja berperan untuk menunjukkan, memberi indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan untuk dilakukan tindakan perbaikan. Pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Pembuatan dan penggunaan indikator kinerja tersebut membantu setiap pelaku utama dalam proses pembelaan publik. Indikator kinerja akan membantu para manajer publik untuk memonitor pencapaian program dan mengidentifikasi masalah yang penting. Selain itu, indikator kinerja juga akan pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran. Indikator kinerja memudahkan bagi DPR/DPRD dalam mengkaji dan mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran, khususnya melalui proses pembahasan pada sidang – sidang dewan. Adapun indikator untuk menentukan indikator kinerja tersebut adalah:

1. Sistem perencanaan dan pengendalian

Sistem ini meliputi proses, prosedur dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang

didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta tanggungjawab.

## 2. Spesifikasi teknis dan standarisasi

Kinerja suatu kegiatan, program dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penelitian.

## 3. Kompetensi teknis dan profesionalisme

Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan, maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan profesional dalam bekerja.

## 4. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar

Mekanisme ekonomi berkaitan dengan pemberian penghargaan dan hukuman yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumberdaya yang menjamin terpenuhinya *value for money*. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman.

## 5. Mekanisme sumber daya manusia

Pemerintah daerah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya untuk memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

## **2.6 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Yani (2009) keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pemisahan dan merupakan satu kesatuan. Dalam otonomi daerah, masalahnya, bukan hanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamatkan oleh kedua undang – undang tersebut.

Yani (2009) pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diikuti dengan

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu di kelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain kedua undang – undang di atas, terdapat beberapaperaturan perundang – undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang – Undang yang dimaksud adalah Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanagn Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

## **2.7 Analisis Rasio Keuangan**

Analisis dari *item-item* laporan keuangan berperan penting dalam interpretasi data keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang memanfaatkan rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis dan interpretasi laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis dapat membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang rasional dan sesuai dengan tujuan entitas karena analisis rasio dapat membantu dalam mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan entitas.



Dengan kata lain, rasio keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi ke dalam bentuk perbandingan dalam rangka mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan. Analisis keuangan merupakan usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

## **2.8 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan**

Martono dan Agus (2001: 240) mengungkapkan bahwa analisis rasio keuangan antara lain berguna dalam:

1. Pengambilan keputusan investasi.
2. Keputusan pemberian kredit.
3. Penilaian aliran kas.
4. Penilaian sumber-sumber ekonomi.
5. Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana.
6. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana.
7. Menganalisis penggunaan dana.

Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi :

1. Perbandingan internal, yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam entitas yang sama.
2. Perbandingan eksternal, yaitu membandingkan rasio sebuah entitas dengan entitas-entitas sejenis atau dengan rata-rata entitas pada saat yang sama.

## 2.9 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Halim (2004:150) menyatakan, ada beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD:

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Halim ( 2004: 150)

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Tabel 2.1  
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegarif

Sumber: Halim, 2004 dalam Ruserlistyanti, 2013

### 2. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau

100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \quad \text{Halim ( 2004: 150)}$$

Tabel 2.2  
Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Kriteria	Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	<75

Sumber: Halim, 2004 dalam Ruserlistyanti, 2013

### 3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \quad \text{(Halim, 2004: 150)}$$

Tabel 2.3  
Efisiensi Keuangan Daerah

<b>Efisiensi Keuangan Daerah</b>	<b>Rasio Efisiensi (%)</b>
Sangat Efisien	<5
Efisien	>5 – 10
Cukup Efisien	>11 – 20
Kurang Efisien	>21 – 30
Tidak Efisien	>30

Sumber: Halim, 2004 dalam Ruserlistyanti, 2013

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD } t_1 - \text{PAD } t_0}{\text{PAD } t_0}$$

(Halim, 2004: 150),

## 2.10 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti/Tahun	Penelitian	Variabel	Model	Hasil
1.	Saftiana/ 2007	Perbandingan indikator kinerja keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan	Variabel kemandirian, efektifitas dan aktifitas keuangan daerah pada lima propinsi se-Sumatera Bagian Selatan	Uji Beda	Hasil analisis menunjukkan bahwa Propinsi Lampung memiliki peringkat tertinggi yaitu 50,11% untuk kemandirian dan 132,17% untuk efektifitas keuangan daerah. Nilai rasio belanja aparatur daerah terendah yaitu 32,43% dan nilai rasio pelayanan publik tertinggi yaitu 40,52 persen. Sementara itu, hasil uji beda Kolmogorof Smirnov menunjukkan nilai asymp sig sebesar 0,859
2.	Hadi/ 2010	Pengaruh likuiditas dengan rasio lancar dan leverage terhadap kemandirian daerah	Variabel Likuiditas dengan Rasio lancar , leverage dan kemandirian daerah	Regresi Berganda	Likuiditas dengan rasio lancar dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian daerah pada pemerintah daerah dalam wilayah Provinsi Aceh sebesar 52,0%. Likuiditas dengan rasio lancar secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah sebesar 74,3%. Leverage secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian daerah sebesar 2,2%.

3.	Yanti/ 2011	analisis rasio sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Soppeng	Variabel rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas (rasio keserasian), <i>debt service coverafe ratio (DSCR)</i> , dan rasio pertumbuhan.	Regresi Berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemda Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat dikatakan memiliki kinerja yang positif.
4.	Fino/ 2011	Analisis rasio sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah Sumatera Barat	Variabel rasio kemandirian, rasio efektifitas keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio aktivitas dan rasio kemampuan keuangan daerah	Regresi Berganda	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengelola keuangan daerah yang baik, yang didasarkan pada kemandirian, efektifitas dan efisiensi, pertumbuhan, dan kemampuan keuangan aktivitas lokal.

Persamaan penelitian dengan yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan variabel rasio kemandirian daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan untuk mengaetahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitiannya di Kabupaten Bengkulu Selatan, selain itu perbedaan pada periode penelitian yaitu penulis melakukan penelitian dari tahun 2008-2012.

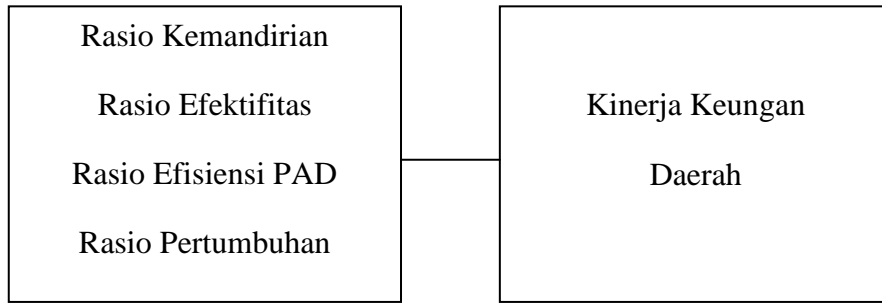
## **2.11 Kerangka Pikir**

Penelitian ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini ada 2 (dua) kebijakan yang sangat berperan di dalamnya, yaitu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Selain itu, juga tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara kebijakan daerah tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Dilihat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan daerah dengan alat analisis sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah
2. Rasio efektifitas
3. Rasio Efisiensi PAD
4. Rasio Pertumbuhan

Alat analisis tersebut digunakan berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang sangat memengaruhi metode pengukuran kinerja keuangan daerah. Rasio-rasio tersebut akan digunakan untuk mendapatkan bukti empiris terhadap kinerja keuangan daerah Pemkab Bengkulu Selatan. Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka pikir secara sistematis seperti berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berdasarkan data berupa angka-angka yang dijabarkan menjadi suatu analisis secara sistematis. Dalam penelitian ini mencari pengaruh variabel independen yaitu, rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan terhadap variabel dependen yaitu rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah.

#### **3.2 Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan. Kinerja keuangan merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai sesuai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur (Nordiawan, 2008).

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah, digunakan analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

b. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{realisasi Penerimaan PAD}}$$

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

$$\textit{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\textit{PAD}_{t_1} - \textit{PAD}_{t_0}}{\textit{PAD}_{t_0}}$$

$t_1$  = Awal tahun

$t_0$  = Akhir tahun

**Tabel 3. 1. Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>
Rasio Kemandirian	Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.	$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat \& Pinjaman}}$
Rasio Efektifitas	Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.	$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$
Rasio Efisiensi	Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima	$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$
Rasio Pertumbuhan	Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya..	$\text{PAD} = \frac{\text{PAD } t_1 - \text{PAD } t_0}{\text{PAD } t_0}$

### 3.3 Asumsi Penelitian

Dalam Keputusan Menteri dalam negeri No 35 Tahun 2002 tercantum anggaran upah pungut untuk pajak daerah dan PBB yang ditentukan pemerintah pusat, yaitu maksimal 5 persen. Yang juga di ikuti dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010 pada pasal 6 ayat satu yang berisisi:

- a. Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 3% (tiga perseratus) untuk provinsi; dan
- b. 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.

Upah pungut itu sendiri diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2002. Aturan mainnya, petugas pemungut pajak berhak menerima 5 persen dari jumlah pajak yang dikumpulkan.

Sedangkan dalam Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 158 disebutkan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang - undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda. Dari pemerintah pusat sendiri tidak menetapkan target untuk pendapatan asli daerah sesuai dengan uu no 33 tahun 2004 Pasal 6 yaitu PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Dan pasal 7 dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk mengetahui Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selama 5 (Lima) tahun, dari tahun 2008 - 2012.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung di instansi pemerintahan, dalam hal ini Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD). Dengan mempelajari dokumen dan arsip - arsip dari dinas tersebut ataupun data – data yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.6 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2008-2012 serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data – data yang digunakan bersumber dari:

**Tabel 3.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Periode 2008 ,2009,dan 2010**

URAIAN	2008	2009	2010
<b>Pendapatan</b>			
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	12.773.550.718,50	22.042.030.166,95	11.894.036.693,62
Pendapatan Pajak Daerah	2.258.735.579,58	1.771.707.506,82	2.169.125.050,60
Pendapatan Retribusi Daerah	5.318.179.988,00	8.229.033.801,00	6.172.276.573,04
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	922.890.256,55	1.900.199.483,33	1.679.852.207,27
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.273.744.894,37	10.141.089.375,80	1.872.782.862,71
<b>Pendapatan Transfer</b>	359.068.454.469,13	345.473.061.746,47	369.343.440.437,80
Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan	350.017.783.050,00	339.328.028.084,00	341.655.587.953,00
Dana Bagi Hasil Pajak	16.382.672.075,00	16.037.293.033,00	19.101.737.197,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	666.970.975,00	660.069.051,00	1.090.041.756,00
Dana Alokasi Umum	267.650.140.000,00	272.434.666.000,00	285.481.509.000,00
Dana Alokasi Khusus	65.318.000.000,00	50.196.000.000,00	35.982.300.000,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	3.649.237.800,00	0,00	18.969..937.200,00
Dana Penyesuaian	3.649.237.800,00	0,00	18.969..937.200,00
Transfer Pemerintah Provinsi	5.401.433.619,13	6.145.033.662,47	8.717.915.284,80
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.401.433.619,13	6.145.033.662,47	8.717.915.284,80
<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	4.000.000.000,00	0,00	13.730.274.038,00
Pendapatan Hibah	2.500.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat	1.500.000.000,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	13.730.274.038,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	375.842.005.187,63	367.515.091.913,42	394.967.751.169,42

Sumber data: Buku APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2008 - 2010

**Tabel 3.3**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan**  
**Periode Per 31 Desember 2011 Dan 2012**

URAIAN	2011	2012
<b>Pendapatan</b>		
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	14.758.401.174,70	18.911.016.577,14
Pendapatan Pajak Daerah	2.756.021.275,00	3.280.921.642,00
Pendapatan Retribusi Daerah	8.234.531.440,00	10.131.635.826,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	1.922.748.224,49	1.161.486.791,56
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.845.100.235,21	4.336.972.317,98
<b>Pendapatan Transfer</b>	459.219.736.125,78	540.927.127.384,36
Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan	382.925.770.693,00	454.456.933.976,00
Dana Bagi Hasil Pajak	19.749.489.730,00	19.501.155.598,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	3.249.663.963,00	4.096.146.378,00
Dana Alokasi Umum	322.293.917.000,00	396.665.102.000,00
Dana Alokasi Khusus	37.632.700.000,00	44.194.530.000,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	67.011.032.760,00	62.582.279.000,00
Dana Penyesuaian	67.011.032.760,00	62.582.279.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	9.282.982.672,78	13.887.914.408,36
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	9.282.982.672,78	13.887.914.408,36
<b>Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	0,00	722.413.690,00
Pendapatan Hibah	0,00	722.413.690,00
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	473.978.187.300,48	539.683.242.575,00

Sumber data: Buku APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2011 – 2012



Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian (*field research*) pada instansi Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPPKAD).

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah diolah dan didapatkan melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia.

### **3.7 Metode Analisis Data**

Jenis rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian.

Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2008-2012. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio-rasio:

#### **1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat

ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}}$$

Halim ( 2004: 150)

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Tabel 3.4  
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegarif

Sumber: Halim, 2004 dalam Ruserlistyanti, 2013

## 2. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Halim ( 2004: 150)

Tabel 3.5  
Kriteria Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Kriteria	Rasio Efektifitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	<75

Sumber: Halim, 2004 dalam Ruserlistyanti, 2013

### 3. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

(Halim, 2004: 150)

Tabel 3.6  
Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	<5
Efisien	>5 – 10
Cukup Efisien	>11 – 20
Kurang Efisien	>21 – 30
Tidak Efisien	>30

Sumber: Halim, 2004 dalam Ruserlistyanti, 2013

#### 4. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD } t_1 - \text{PAD } t_0}{\text{PAD } t_0}$$

(Halim, 2004: 150),

**$t_1$  = Awal tahun**

**$t_0$  = Akhir Tahun**